

## MUSLIM MODERAT, WACANA POLITIK DAN PERTARUNGAN RELASI KUASA

Oleh :

**HAFIDZ HASYIM**

*Dosen STAIN Jember Jurusan Tarbiyah*

### **Abstract**

*The focuses of this research are (1) ideas that are produced by moderate moslems in Jember in relation with the ongoing "democratic celebration", (2) the ideological tendencies in moderate moslems' discourse, and (3) the "local tricks" used to transform political discourse to build civil society. This is a field research which studied the data from field findings supported by references such as books, journals, and the other supporting data. This research is qualitative in nature. The research aims to find the meaning built by the moderate moslems in using interpretation, hermeunetic, discourse analysis based on the observation, interview, documentation, and text study.*

**Kata Kunci:** Muslim Moderat, Wacana Politik, Pemilu dan Ideologi

### **PENDAHULUAN**

Selama lima tahun terakhir, masyarakat Jember telah disibukkan oleh Pesta demokrasi (Pemilu), baik yang dilakukan pada tingkat Nasional (Pemilihan Presiden maupun Legislatif) maupun pada tingkat Regional (Pemilihan Gubernur dan Bupati). Penyelenggaraan Pemilu merupakan tuntutan dari proses demokrasi dalam dunia modern, sehingga seolah-olah Pemilu merupakan keharusan global, yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang mengaku sebagai negara demokrasi-modern.

Namun proses pemilu menyisakan banyak persoalan yang menjadi agenda bangsa Indonesia sendiri. Agenda terpenting dari bangsa ini adalah kemiskinan dan kesejahteraan, penegakan dan supremasi hukum, stabilitas sosial dan politik dan terjamin hak mendapat fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan jaminan sosial dan lain-lain. Adakah pemilu mampu menghantarkan kepada penyelesaian terhadap agenda besar bangsa ini?.

Persoalan lain yang mengiringi Pemilu selain berbagai problem bangsa adanya besarnya biaya penyelenggaraan Pemilu. Untuk sekali Pemilu saja, Pileg dan Pilpres, KPU menganggarkan biaya triliunan rupiah (Kompas, 24/11/2008; Tempo Interaktif, 11/12/2008).

Selain persoalan dana, juga muncul persoalan pertarungan politik. Pesta demokrasi adalah realitas politik dengan berbagai macam pertarungan antar kalangan elit politik---untuk memperebutkan dukungan massa politik dicapai dengan cara-cara yang jauh dari kehidupan demokratis. Tidak salah jika muncul pandangan dari berbagai pihak bahwa bila dianalisa lebih mendalam, pemilu adalah sarana kaum borjuasi Indonesia untuk mengkonsolidasikan dirinya, sebagai kekuatan politik yang setia menjalankan program-program lama, atau wacana kontemporer dengan istilah *neo-liberalisme*, sehingga pemilu bukanlah pemilu rakyat (pemilu yang diabdikan untuk kepentingan mayoritas masyarakat).

Di tengah berbagai problem yang mengiringi pemilu seperti diuraikan di atas, maka persoalan politik yang cukup menarik adalah bagaimana keberadaan kekuatan kalangan politik Islam? Dalam konteks persoalan tersebut, penelitian ini mengambil tema kajian tentang peran yang dimainkan oleh kalangan kelas menengah-Intelektual muslim moderat dalam melihat dan merespon pemilu. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Gagasan (wacana) politik seperti apa yang diproduksi muslim moderat Jember---relasinya dengan pertarungan kuasa yang mereka lakukan pada pesta demokrasi?. 2). Kecenderungan ideologis maupun politis yang terdapat dalam wacana politik yang diproduksi muslim moderat Jember---relasinya dengan pertarungan kuasa pada pesta demokrasi?. 3). Siasat lokal muslim moderat Jember dalam mentransformasikan wacana politiknya---sebagai jembatan dalam menciptakan masyarakat *civil society*.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Ingin mendiskripsikan dan memperoleh pemahaman---pertarungan relasi kuasa muslim moderat (produksi wacana politik) kaitannya dengan pesta demokrasi regional maupun nasional. 2). Ingin mendiskripsikan dan mendapatkan pemaknaan---kecenderungan ideologis; cara pandang, selera, sistem nilai dan keyakinan yang dikonstruksi muslim moderat. 3). Ingin mendiskripsikan dan menganalisa siasat lokal (langkah strategi) yang dibangun oleh muslim moderat dalam mentransformasikan ide-idenya.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah upaya pencarian makna/pemahaman atas kerangka fikir (*mindset*) maupun ideologi muslim moderat dalam memproduksi wacana politik. Pendekatan ini menekankan upaya mengelola kebermaknaan secara filosofis

dan teoritis dan upaya mencapai objektivitas makna serta nilai yang terkandung dalam objek penelitian. Sedangkan pendekatan deskriptif akan digunakan sejak persiapan penelitian, pengumpulan data sampai analisa data.

### Informan Penelitian

Penelitian ini mengambil objek materialnya tentang pemikiran muslim moderat, terutama berkaitan dengan produksi wacana yang dibangun, dasar ideologi dan langkah strategi yang dipakai dalam melihat berbagai persoalan pemilu. Tentu saja, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah umat Islam yang dikategorikan sebagai muslim moderat. Kelompok muslim moderat adalah kelompok yang memiliki cara pandang inklusif terhadap keragaman agama, etnik, budaya, sosial-politik, dan melakukan tindakan transformatif, progresif dalam melakukan proses transformasi demi terwujudnya tatanan yang lebih demokratis. Muslim Moderat juga memiliki ideologi *tasamuh*, *tawasuth*, tidak terlalu konservatif-radikal, militan-fundamental maupun liberal-materialis. Penentuan informan dilakukan secara *snowballing*, yaitu; untuk pertama kali peneliti menemui salah seorang informan yang dipandang cukup memahami akan tema dimaksud, lalu dikembangkan dan dilacak ke informan-informan berikutnya.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1). Wawancara mendalam; mengajak informan untuk melakukan refleksi interpretasi terhadap realitas sosial politik yang mengiringi lahirnya wacana politik. 2). Observasi; untuk menggali data terkait dengan potret muslim moderat Jember aktivitas intelektual dan tindakan praksis mereka sehingga diperoleh deskripsi konteks sosiologis, antropologis, maupun politis dan wacana yang diproduksi. 3).

Dokumentasi; untuk menggali wacana yang terdokumentasikan; seperti catatan harian atau ilmiah mereka, koran majalah, jurnal, dan sumber dokumen lain

### Analisa Data

Penelitian ini juga menggunakan metode dalam rangka melakukan analisa data. Metode analisa data diperlukan untuk mengonstruksi konsep-konsep teoretis dan mensistimatisasi hasil peneltian di lapangan tentang wacana, langkah dan ideologi yang dibangun oleh muslim moderat. Dalam penelitian ini, selain dilakukan analisa deskriptif, digunakan pula metode analisa lain sebagai berikut : *pertama*, discourse analysis--menganalisa dan merefleksikan segala wacana-wacana politik yang diproduksi oleh muslim moderat dengan cara; a). membaca dan mempelajari data, kemudian mencari pola-pola yang menarik dari data, pola-pola hubungan dari data; sisi persamaan atau sisi kontradiksi, b). mencari konsep dari istilah-istilah yang muncul, yang mampu merangkum sejumlah data, c). mencari hubungan antara konsep-konsep untuk mengembangkan suatu konstruksi teoretis dengan cara *constant comparatif method*, yaitu mengidentifikasi suatu wacana politik kemudia mengkaitkan dengan pandangan hidup, lokasi tempat tinggal masyarakat muslim secara umum.

*Kedua*, Verstehen---hasil konstruksi teoritis, kemudian dikembangkan dengan analisa verstehen---;proses analisa pada tahap analisa simbolik untuk menangkap isi pemikiran, interpretasi---;menangkap makna dari konsep-konsep dan mendeskripsikan secara sistimatis.

*Ketiga*, Heurmeneutik---;menafsirkan, mengungkap dan menganalisa segala makna esensial-substansial yang terungkap dalam setiap pemikiran. Metode heurmeneutik cukup penting digunakan dalam penelitian ini, karena ingin mengungkapkan dan menganalisa segala makna esensial dalam konteksnya.

Upaya mengungkapkan dan menganalisa makna setiap pemikiran muslim moderat.

*Keempat*, Metode Deduksi dan Induksi. Kedua metode ini diterapkan dalam penelitian setelah data-data telah dikumpulkan dan dianalisa, lalu kemudian disimpulkan berdasarkan data-data tersebut. Penyimpulan ini tidak untuk merumuskan suatu generalisasi tetapi untuk mewujudkan suatu konstruksi teoritis.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan wacana politik yang digulirkan oleh kalangan Muslim moderat Jember, yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: produksi wacana politik Muslim moderat, ideologi wacana politik Muslim moderat, upaya-upaya perubahan ke arah yang lebih baik yang diusulkan oleh Muslim moderat Jember.

#### *Wacana Politik Muslim Moderat Islam dan Demokrasi*

Wacana Islam dan demokrasi sudah lama menjadi perbincangan berbagai kalangan. Seluruh kaum Muslim moderat menerima demokrasi. Demikian halnya tokoh-tokoh Muslim moderat di Jember. Nur Hasan misalnya, mengatakan bahwa hingga kini demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan pemerintahan yang lebih baik dibanding dengan sistem-sistem yang lain, seperti kerajaan, khilafah, aristokrasi, atau lainnya. Sebab, hanya sistem demokrasilah yang menjamin keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia tidak mempersoalkan dari mana asal konsep demokrasi. Kendati demokrasi berasal dari dan berkembang terlebih dahulu di Barat, demokrasi tetap dipandang sebagai pilihan terbaik dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demokrasi juga tidak mesti membawa unsur materialisme, yang menjadi paradigma masyarakat Barat.

Hal senada juga disampaikan oleh KH.

Muhyiddin Abdussomad, mantan Ketua Tanfidiyah NU Jember 1999-2009. Ia memandang bahwa sistem demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebab substansi demokrasi adalah partisipasi politik dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini menyebabkan rakyat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan publik dan melindungi hak-hak asasi manusia, yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan dan persamaan di muka hukum. Konsep demokrasi semacam ini tidak hanya sesuai dengan Islam, tetapi juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa.

Islam mewajibkan umat Islam untuk bermusyawarah berbagai hal. Kewajiban bermusyawarah ini ditunjukkan dengan tegas dalam Al-Qur'an, seperti "*wasyawirhum fi al-amr*" (bermusyawarahlah dengan mereka dalam menyelesaikan persoalan) [Q.S. 3: 159] dan "*wa amruhum syura bainahum*" (mereka menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah) [Q.S. 42: 38]. Kata *syawir* dalam tata bahasa Arab disebut dengan *amar* (perintah). Dalam kaidah fiqh, kita juga mengenal *al-ashl fi al-amr li al-wujub*, pada dasarnya bentuk *amar* menunjukkan arti wajib. Allah tidak akan menggunakan bentuk *amr* jika musyawarah bukan sesuatu yang benar-benar penting bagi umat manusia.

Kata *syura* dalam dua ayat di atas merupakan suatu prinsip yang menolak elitisme, di mana hanya pemimpin (elit) yang mengetahui bagaimana mengatur dan mengelola negara, sedangkan rakyat hanyalah massa pasif yang mengikuti kehendak kaum elit. Konsep *syura* dapat berperan sebagai benteng yang kuat menentang pelanggaran negara, otoritarianisme, despotisme, kediktatoran dan sistem-sistem lain yang mengabaikan hak-hak politik rakyat.

### Menolak Pemilu Langsung

Pemilu dalam arti ideal acapkali bertolak belakang dengan realitas. Banyak

penyelewengan-penyelewengan Pemilu yang melibatkan hampir semua kontestan pemilu: partai politik, massa politik, maupun penyelenggara pemilu. Tindakan yang menciderai demokrasi itu antara lain *black campaign*, *money politic*, *mark up* suara, dan sebagainya. Inilah yang mendapat sorotan dari kalangan Muslim moderat.

Nur Hasan menegaskan bahwa arah pelaksanaan menuju pemilu sebagai instrumen demokrasi utama yang ideal sudah cukup bagus. Dalam implementasinya saja yang masih belum bagus akibat penyimpangan-penyimpangan yang justru menciderai ruh demokrasi itu sendiri. Ketidak beresan penyelenggaraan pemilu justru dilakukan oleh para penyelenggaranya sendiri. Penyimpangan-penyimpangan pemilu terjadi akibat rendahnya moral politik para kandidat, tim sukses, dan penyelenggara pemilu. Misalnya, pertimbangan-pertimbangan idealis dan rasional dalam memilih dirusak oleh pertimbangan-pertimbangan material. Penyimpangan itu, lanjut Ketua Ikatan Alumni PMII (IKA PMII) ini dipengaruhi oleh: 1) ketidakpahaman secara benar para pelaku demokrasi sendiri, 2) orientasi jangka pendek dari para aktivis politik, dan 3) keterdesakan masyarakat di bidang ekonomi mereka.

Hal senada juga diutarakan oleh Ayu Sutarto. Ia menyatakan bahwa yang salah bukan sistemnya, tetapi mental masyarakat. Sistem itu dibuat oleh masyarakat. Sistem adalah produk negara, sementara negara adalah produk masyarakat. Kita itu selalu bagus pada tataran konsep dan wacana, tetapi buruk pada tataran praktik dan operasional.

Menyikapi penyelewengan pemilu seperti di atas, kaum Muslim moderat menyikapi pemilu langsung. Kelompok Muslim moderat, termasuk NU, memandang bahwa belum waktunya menerapkan pemilu langsung di Indonesia. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum masuk dalam kategori pemilih

rasional. Sebaliknya, mereka cenderung menentukan pilihannya karena pertimbangan-pertimbangan keuntungan sesaat. Akibatnya, kemungkinan besar hasil pemilu langsung itu justru melahirkan wakil-wakil dan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah; pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk merengkuh kepentingan pribadi. (wawancara dengan KH. Muchith Muzadi)

Wacana menolak pemilu langsung ini awalnya digulirkan oleh beberapa tokoh PBNU, yang dengan cepat bergulir ke daerah-daerah. Dalam buku *Fikih Menggugat Pemilihan Langsung*, KH. Afifuddin Muhajir mengutip pandangan Al-Mawardi yang mengemukakan beberapa mekanisme mengangkat pemimpin, di antaranya melalui pemilihan. Akan tetapi, tidak setiap orang memiliki hak memilih (*haqq al-ikhtiyar*). Hak memilih hanya dimiliki oleh orang-orang yang memenuhi syarat berikut: 1). memiliki sifat 'adalah (keadilan) dalam pengertiannya yang luas. 2). memiliki ilmu pengetahuan tentang calon pemimpin yang berhak dipilih. 3). memiliki hikmah kebijaksanaan yang bisa mengantarkan kepada terpilihnya orang yang paling layak menjadi pemimpin.

Dalam sistem kenegaraan demokrasi yang telah banyak diterapkan di pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang telah cukup umur diberi hak untuk memilih. Secara teoritis, sistem ini adalah ideal karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih pemimpin yang disenangi. Namun rakyat Indonesia masih belum siap untuk menerapkan pemilihan langsung. Sekurang-kurangnya ada dua alasan yang bisa dikemukakan di sini. *Pertama*, mayoritas masyarakat Indonesia masih 'awam-'awam, tidak paham dan tidak memiliki pengetahuan cukup tentang kualitas dan integritas calon, apalagi untuk memenuhi tiga syarat *ahl al-ikhtiyar* seperti dikemukakan di atas. *Kedua*, masyarakat Indonesia banyak yang miskin, sehingga meskipun paham dan mengerti

tentang calon, mereka gampang menjual hati nuraninya dengan harga yang sangat murah (*tsamanan qalilan*).

Senada dengan KH. Afifuddin Muhajir, KH. Miftakhul Akhyar (Rais Syuriah PWNU Jatim) menegaskan, "Pemilihan langsung merusak karena mengarah pada pragmatisme politik (Surya, 2009)." Pandangan ini tentu bisa dipahami mengingat wajah pemilu di Indonesia memang dicoreng dengan pragmatisme politik, baik elit maupun masyarakat di tingkat akar rumput. Jika cara-cara yang ditempuh pragmatis, maka bisa dipastikan hasilnya adalah wakil-wakil dan pemimpin-pemimpin yang pragmatis.

### Revitalisasi Ideologi Partai

Pragmatisme politik yang mewarnai perjalanan politik Indonesia satu dekade terakhir memunculkan pertanyaan apakah ideologi partai politik dan masyarakat sudah memudar sehingga semua sama-sama mengedepankan kepentingan sesaat?

Hal mendesak yang harus dilakukan oleh partai politik adalah revitalisasi ideologi. Semua partai sebenarnya muncul atas dasar ideologi, baik berbasis ajaran (termasuk agama) maupun berbasis gerakan sosial. Kalau memang ideologi sudah memudar dan tidak ada upaya-upaya revitalisasi, maka perkembangan politik akan suram. Kompetisi politik adalah kompetisi untuk memperebutkan amanah negara atau undang-undang dalam rangka menyejahterakan rakyat. Harusnya partai-partai memiliki visi yang berbeda dalam menjabarkan upaya mereka untuk menyejahterahkan rakyat berdasarkan ideologi mereka, sehingga rakyat bisa memilih visi-visi dari partai-partai itu sendiri. (wawancara dengan KH. Muhyidin Abdussomad dan KH. Muchith Muzadi).

Memudarnya ideologi partai pada giliran selanjutnya berakibat pada rendahnya kualitas hasil pemilu, baik legislatif maupun

eksekutif. Orang yang terpilih menjadi wakil rakyat atau pemerintah bukan orang yang benar-benar pantas untuk menerima amanah mulia itu. Banyak sekali orang-orang yang duduk di singgasana kekuasaan yang semata-mata untuk merengkuh keuntungan pribadi, atau minimal sekedar mencari popularitas. Demokrasi dengan demikian sudah kehilangan ruhnya, dan rakyat mesti siap-siap untuk sakit hati akibat kesejahteraan dan keadilan tidak pernah menyapa mereka.

### **Ideologi Wacana Politik Muslim Moderat**

Faktor apa yang paling menentukan seseorang menganut suatu ideologi? Ali Syariati menyebut *keyakinan* adalah hal yang pokok. Untuk menganut suatu ideologi tidak diperlukan pengetahuan akan basis filosofis suatu ideologi. Ideologi lahir dari rahim massa-kemanusiaan. Ideologi lahir dari pergulatan sosial. Kontradiksi dan desakan sosial memberikan perspektif bagi seseorang untuk memilih realitas sosial yang dicita-citakan. Ini adalah embrio yang berkembang menjadi cita-cita institusional ideologis yang selalu berbeda dengan status quo yang ada. Ali Syariati memberi contoh hasil penelitian Vincent Monteil yang menunjukkan bahwa 4 dari 5 orang Afrika yang memutuskan memeluk Islam adalah karena Islam mampu memberikan pijakan ideologis yang menentang fasisme dan ketidaksamaan (Mustafid, 2001; 172-3)

### **Spiritualitas Ketuhanan**

Uraian di atas menegaskan bahwa suatu pemikiran atau gerakan sosial tidak akan lepas dari basis ideologi yang dianut. Demikian halnya dengan wacana politik yang dilontarkan kaum Muslim moderat Jember. Wacana yang mereka lontarkan tentang demokrasi, pemilu, dan kekuasaan didasari oleh ideologi yang menjadi penuntun cara berpikir, bersikap, dan bertindak.

Hasil interview terhadap sejumlah informan menunjukkan bahwa ideologi wacana politik kaum Muslim moderat Jember berakar pada pandangan mereka terhadap Islam. Bagi Muslim moderat, Islam merupakan agama yang inklusif. Agama Islam sangat menghargai tradisi-tradisi positif yang telah ada sebelum Islam dan juga tidak menutup diri terhadap perubahan-perubahan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan semangat Islam sendiri sebagai agama pembawa rahmat untuk semesta alam. Inilah wajah Islam Nusantara yang berbeda dengan wajah Islam di negara-negara lain.

Dengan watak inklusifnya, kaum Muslim moderat memilih posisi tengah-tengah (*wasathan*), tidak ekstrim kanan maupun kiri. Karenanya, Muslim moderat menolak radikalisme berbasis agama, dan juga menolak liberalisme ala Barat yang bebas tak terkendali. Namun ini tidak berarti bahwa Muslim moderat menampilkan Islam yang mengorbankan makna Islam itu sendiri. Justru Islam sedang ditampilkan secara progresif dan penuh toleransi. Tema-tema yang diajukan kalangan Muslim moderat adalah seperti menentang teokrasi, mendukung demokrasi, menghormati hak-hak perempuan, menghargai hak-hak non-Muslim, kebebasan berpikir, dan gagasan tentang kemajuan, perlu dikedepankan. Dalam tulisannya yang berjudul *Bangsa dan Ideologi Transnasional*, KH. Hasyim Muzadi (Sindo, 09/05/2007) menguraikan bahaya yang ditebar oleh ideologi-ideologi transnasional, baik berbasis agama maupun non agama. Menurutnya, liberalisme Barat maupun Islam ideologis dari Timur Tengah sama-sama merusak. Masuknya ideologi transnasional ke Indonesia itu dapat merusak tatanan Indonesia. Karenanya, pemerintah harus menggunakan Pancasila sebagai ideologi yang membatasi masuknya ideologi transnasional.

Setelah ideologi liberalisme Barat tersebar melalui kolonialisme di negara-

negara dunia ketiga, termasuk dunia Muslim, lahir gerakan Islam di Timur Tengah, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tharir, Majelis Mujahidin, Al-Qaeda, dan sebagainya adalah reaksi dari liberalisme berbalut penjajahan ini. Di Indonesia, zaman pra-kemerdekaan ditandai dengan munculnya organisasi nasionalisme seperti Budi Utomo, Serikat Dagang, dan lain-lain.

Kaum Muslim moderat masih bersikap toleran terhadap demokrasi kendati perjalanan demokrasi di Indonesia tidak kunjung baik dan belum bisa membawa kepada kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan puncak (*the ultimate goal*) dari demokrasi. Sistem pemilu — sebagai “satu-satunya” media keterlibatan rakyat dalam politik — yang carut marut juga masih dipandang sebagai media terbaik.

Yang menjadi masalah adalah, mengapa muslim moderat bersikap toleran, inklusif dan *tawasuth* dalam berpolitik? Ternyata Muslim moderat dalam membaca teks agama tidak hanya secara literal, tetapi secara kontekstual, substansial, dan memperhatikan sisi-sisi spiritualitas. Istilah spiritual lebih didekatkan dengan pemahaman kalangan sufi dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam. Oleh sebab itu, ideologi kaum Muslim moderat berakar dari warisan tradisi sufi yang menekankan aspek batiniah dan spiritualitas. Ini bisa dipahami karena ajaran Islam yang diterima Muslim moderat di Indonesia melalui mata rantai ulama-ulama sufi, khususnya Walisongo. Secara prinsip, para Sufi memahami syari'ah sebagai jalan (*tariqah*) bukan tujuan. Karena itu, mereka sangat toleran dan inklusif pada saat berpapasan dengan para penempuh jalan yang berbeda. Mereka sadar bahwa para penempuh jalan (baca: umat beragama) sama-sama ingin mendekat kepada Tuhan (Wahid, 2009:115)

Wujud implementasi dari persepsi kesamaan tujuan di atas terlihat jelas dari proses islamisasi di Indonesia. Berbeda dengan islamisasi di Timur Tengah, islamisasi

di Indonesia berjalan secara damai, tanpa pertumpahan darah karena kecerdasan kaum sufi mendialogkan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, ideologi yang dilekatkan pada Muslim moderat adalah bahwa mereka membaca teks agama mereka dengan menggunakan cara pandang kontekstual, substansial, dan memperhatikan sisi-sisi spiritualitas. Karenanya tidak mengherankan manakala sikap Muslim moderat sangat toleran, inklusif dan *tawasuth*.

### **Sikap (Kontradiksi-Kompartmentalism) Muslim Moderat**

Penerimaan Muslim moderat terhadap sistem demokrasi di sisi nilai, walaupun ia bersumber bukan dari ajaran Islam, dan menolak implikasi logis dari nilai demokrasi dalam aplikasi praksis menunjukkan sikap kontradiksi berfikir yang ada pada mereka. Atau mereka menginginkan kehidupan yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kehidupan Islam yang diajarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan menganggap kurang cocok sistem demokrasi modern, tetapi menerima sebagai sebuah sikap pilihan karena tidak ada pilihan lain.

Tampak bahwa corak pemikiran Muslim moderat merupakan kelanjutan tradisi intelektual sebelumnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan perjalanan sejarah, bahwa sikap masyarakat Muslim sejak Indonesia berdiri sampai sekarang selalu diwarnai ketegangan antara mempertahankan tradisi atau mengikuti arus nilai modern.

Sejak awal, sebagian umat Islam Indonesia menolak sistem demokrasi ala Barat secara prinsip dan menerima secara praksis. Sehingga tidak salah jika sepanjang sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan-perubahan. Setidaknya terdapat dua model kepemimpinan demokrasi ala Indonesia, yaitu; demokrasi sistem sipil

diktator Soekarno dan demokrasi sistem militer diktator Soeharto. Masing-masing kepemimpinan ini mengalami ketegangan dengan masyarakat Muslim atau partai politik Islam. Soekarno pernah membubarkan Masyumi, dan Soeharto menghambat arus partai politik Islam dengan cara meleburkan semua partai Islam dalam satu partai.

Lagi-lagi sikap kontradiksi ini ditunjukkan oleh umat Islam. Mereka menolak system demokrasi ala Soekarno dan Soeharto secara prinsip dan menerima secara praksis. Saat ini di Era reformasi, yang ruang politik sipil semakin terbuka, tetapi ada sisi gelap lain yang semakin menakutkan bagi masa depan demokrasi di Indonesia, yaitu sistem politik uang karena pengaruh kapitalisme dan liberalisme. Dan anehnya kalangan Muslim moderat menolak sistem demokrasi secara prinsip, tetapi menerima bahwa sistem Pemilu sebagai keharusan praksis.

Sisi ambigu dan kontradiksi muslim moderat lain dapat ditunjukkan. Mereka mengkritik kekacauan pemilu dan proses demokrasi di satu sisi, tetapi mereka masih memandang demokrasi dan pemilu sebagai sistem terbaik dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ini barangkali merupakan sublimasi dari sikap *tawasuth*, *tasamuh*, dan *tawazun* sikap politik mereka, sehingga selalu berada dalam posisi "abu-abu".

Akibat dari kontradiksi atau ambiguitas politik di atas, secara sederhana, terdapat dua pola dalam pemikiran Muslim moderat, yaitu; idealis dan realis. Biasanya para intelektual idealismencurahkan pemikirannya pada hal-hal yang uthopis, berbicara apa yang seharusnya, bukan apa adanya. Pemikiran idealis nampak ditunjukkan dengan menginginkan masyarakat ideal dan mengutuk masyarakatnya yang semakin pragmatis dalam politik. Mereka menginginkan kehidupan partai syarat dengan pertarungan ideologi seperti pada masa orde lama. Sedangkan sebagian yang lain tidak terlalu mementingkan ideologi,

atau mungkin berakhirnya ideologi, tetapi lebih menekankan pada upaya pemberdayaan politik masyarakat

## KESIMPULAN

Mengakhiri penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu:

*Pertama*, bahwa Muslim Moderat sama sekali tidak mempersoalkan sistem demokrasi yang sudah berjalan selama ini, termasuk persoalan konteks implementasinya, yaitu; Pemilu. Kalangan muslim moderat menganggap pemilu sebagai satu-satunya cara dalam mewujudkan sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi modern masih dianggap sebagai sistem yang paling baik, dan belum ada sistem lain yang bisa menggantikan, termasuk sistem khilafah yang diusung oleh kalangan muslim lain (baca; fundamentalis). Muslim moderat menilai bahwa demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena di dalamnya ada prinsip musyawarah dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh Islam. Hanya saja yang menjadi sorotan terpenting adalah persoalan implementasi pemilu di lapangan. Muslim moderat menilai bahwa pemilu telah banyak diselewengkan oleh penyelenggara dan pelaku pemilu, terutama kalangan elit politik, hal ini disebabkan sikap pragmatisme politik elite, dan ketidakberdayaan massa, baik secara politik maupun ekonomi. Melihat kondisi itu, sebagian muslim moderat menginginkan reideologisasi, sedangkan sebagian yang lain pemberdayaan politik lewat kebudayaan.

*Kedua*, Kecenderungan muslim moderat untuk menerima pemilu dan nilai-nilai demokrasi didasarkan atas sebuah ideologi atau pemahaman keagamaan yang menyertainya. Muslim moderat cenderung toleran, inklusif dengan nilai-nilai lain asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sikap ini merupakan kelanjutan dari tradisi sufi, yang lebih menekankan pemahaman ajaran Islam secara spiritual, dibandingkan dengan



pemahaman teks keagamaan secara literal, terjebak simbol-simbol dan formalitas keagamaan. Hanya saja yang menjadi masalah adalah sikap *tawasuth*, *tasamuh*, inklusif adalah sikap yang penuh diwarnai dengan sikap kontradiksi dan ambiguitas. Sikap kontradiksi dan ambigu nampak ditunjukkan dengan di satu sisi penerimaan terhadap demokrasi secara prinsip dan menolak sistem penyelenggaraan demokrasi secara praksis, sedangkan di sisi lain penerimaan Muslim moderat terhadap sistem demokrasi di sisi nilai walaupun bersumber bukan dari ajaran Islam, dan menolak implikasi logis dari nilai demokrasi dalam aplikasi praksis. Atau mereka menginginkan kehidupan yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kehidupan Islam yang diajarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan menganggap kurang cocok sistem demokrasi modern, tetapi menerima sebagai sebuah sikap pilihan karena tidak ada pilihan lain. Sikap kontradiksi dan ambigu merupakan warisan tradisi ulama' masa lalu, ketika mengalami proses transformasi sosial politik dari tradisi Nabi yang memiliki otoritas wahyu kepada para sahabat yang tidak memiliki otoritas wahyu.

*Keempat*, demokrasi di Indonesia tidak memiliki akar yang kuat dalam budaya Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia selalu mencari bentuk untuk mewujudkan demokrasi ala Indonesia. Dalam konteks ini, muslim moderat mengusulkan agar kedepan demokrasi dijauhkan dari nilai kapitalisme dan pragmatis, memasukkan nilai Islam dan nilai moral dalam berdemokrasi, dan yang paling penting adalah pendidikan politik masyarakat yang mencerdaskan. Jika masyarakatnya cerdas-rasional-idealis, maka politik uang dengan sendirinya akan terkikis habis.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka perlu disampaikan saran dan rekomendasi kepada;

*Pertama*, Semua pihak, baik kalangan elit

politik, penyelenggara pemilu, maupun warga masyarakat, meningkatkan kualitas Pemilu, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menciderai makna dan proses pemilu.

*Kedua*, Semua masyarakat Muslim, menghindari berbagai bentuk tindakan pragmatisme dalam setiap even-even Pemilu, seperti *money politic*, kecurangan pemilu yang menyebabkan pemilu tidak lagi memilih pemimpin yang ideal, tetapi memilih yang memiliki capital walaupun kualitas diri sebagai mahluk pribadi dan sosial sangat rendah.

*Ketiga*, Semua masyarakat Muslim, terutama para pemilih muslim moderat, memahami bahwa Indonesia baru mengenal proses demokrasi, karena demokrasi sebenarnya tidak memiliki akar tradisi yang kuat dalam budaya Indonesia. Oleh sebab itu, proses demokrasi di Indonesia masih mencari bentuk. Oleh sebab itu, diharapkan kepada semua pihak, termasuk partai politik, baik partai politik Islam maupun non Islam untuk tidak hanya memanfaatkan suaranya untuk kepentingan pribadi maupun partainya, tetapi lebih dari itu, untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara luas dengan cara memiliki apresiasi yang cukup terhadap pemberdayaan politik masyarakat. dan,

*Keempat*, Semua masyarakat pemilih Muslim, tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan berusaha untuk tetap menjaga moral politik agar senantiasa dihindari dari sikap pragmatisme politik, yang dalam jangka panjang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. Alfian. 2002. "Momentum Kebangkitan Islam Moderat". *KOMPAS*, 1 Februari 2002
- Bocock, Robert. 1986. *Hegemoni*. London: Tavistock Publication
- Gramsci, Antonio. 1976. *Selection From The Prison Notebooks*, 1976, New York: Inter-

- national Publisher.
- Haramain, Abd. Malik. dkk. 2001. *Pemikiran-Pemikiran Revolusionir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamim, Thoha. 2004. *Islam & NU Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, Surabaya: Diantama.
- Muzadi, KH. Hasyim. 2007. "Bangsa dan Ideologi Transnasional". *Sindo*, Rabu 09 Mei 2007.
- Hendarto, Heru. 1993. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta : Tim Redaksi Driyakara, Gramedia.
- KOMPAS. 2009. "Biaya Pilkada Berlebihan". Sabtu 24 Januari 2009.
- KOMPAS. 2008. "Anggaran Pilpres 2009 Rp. 9 triliun". 4 Nopember 2008.
- Latif, Yudi & Ibrahim, Idi Subandy. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan; Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan.
- Lechte, John. 2001. *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Ma'arif, A. Syafi'i. 2009. "Masa Depan Islam di Indonesia", dalam *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: the Wahid Institute dan Maarif Institute.
- Mustafied, Muhammad. 2001. "Merancang Ideologi Gerakan Islam Progresif-Transformatif", dalam Muhidin M. Dahlan. 2001. *Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat?*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suaedy, Ahmad. 2004. "Muslim Progresif dan Praktek Politik Demokratisasi di Era Indonesia Pasca Soeharto", dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*. Edisi No. 16, 2004. Jakarta: Lakspesdam NU.
- Sunardi, St. 1996. *Nietzsche*. Yogyakarta: LKiS
- Suwondo, Kutut. 2005. *Civil Society di Aras Lokal, Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pustaka Percik.
- Tempo Interaktif, Para Penyelenggara Pilkada Jatim Didesak Pertenggung jawabkan Dana Pilkada*, Senin 11 Agustus 2008.
- Wahid, Abdurrahman, et.al. 2009. *Ilusi Negara Islam*, Jakarta, Wahid Institute.